

**EFEKTIFITAS PERATURAN BERSAMA MENTERI NOMOR 8 DAN 9  
TAHUN 2006 TERHADAP REGULASI PERIZINAN RUMAH IBADAT  
KHUSUSNYA BAGI PENGANUT AGAMA MINORITAS DI INDONESIA**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**PENYUSUN :**  
**FERNANDO MORIENTES BUTAR - BUTAR**  
**1640050168**

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2020**

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama Mahasiswa : Fernando Morientes  
Nomor Induk Mahasiswa : 1640050168  
Jurusan/Peminatan : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : **EFEKTIFITAS PERATURAN BERSAMA MENTERI  
NOMOR 8 DAN 9 TAHUN 2006 TERHADAP  
REGULASI PERIZINAN RUMAH IBADAT  
KHUSUSNYA BAGI PENGANUT AGAMA  
MINORITAS DI INDONESIA**

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana Magister, Doktor), baik di Universitas Kristen Indonesia maupun perguruan tinggi lain.
2. Pernyataan atau pendapat dari orang lain yang terdapat dalam skripsi ini sebagai acuan dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari ditemukan penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Jakarta, 7 Februari 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:



Fernando Morientes

1640050168

## **VISI & MISI**

### **Visi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia**

Menjadi program studi unggulan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu hukum di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2034 yang peka dan antisipasif terhadap segala perubahan dalam era globalisasi sesuai nilai-nilai kristiani berdasarkan pancasila.

### **Misi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia**

1. Mempersiapkan lulusan yang peka dan antisipasif terhadap perubahan dan masalah sosial dan hukum dalam masyarakat.
2. Mengembangkan dan melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas dengan penguasaan dan teknologi yang bersifat interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat khususnya di Asia Tenggara.
3. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian berbasis problem solving dalam berbagai masalah-masalah sosial dan hukum dalam masyarakat untuk dapat mencari dan menawarkan solusi penyelesaian yang terbaik.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat demi peningkatan kesadaran hak dan kesadaran hukum anggota masyarakat demi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**EFEKTIFITAS PERATURAN BERSAMA MENTERI NOMOR 8 DAN 9**  
**TAHUN 2006 TERHADAP REGULASI PERIZINAN RUMAH IBADAT**  
**KHUSUSNYA BAGI PENGANUT AGAMA MINORITAS DI INDONESIA**

**Skripsi**

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh

**Nama : Fernando Morientes**

**NIM : 1640050168**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 31 Januari 2020 dan dinyatakan telah lulus dan memenuhi syarat untuk  
memperoleh gelar sarjana hukum (S1)

**Susunan Tim Penguji**

Dosen Penguji I



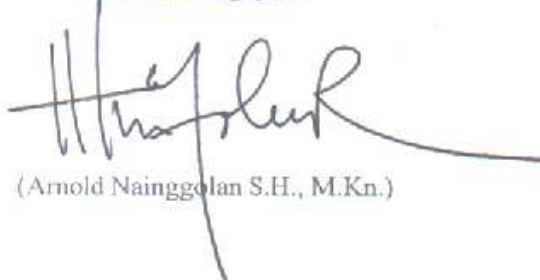
(Poltak Siringringo S.H., M.H.)

Dosen Penguji II



(DR. Manotar Tampubolon S.H., M.H.)

Dosen Penguji III



(Arnold Nainggolan S.H., M.Kn.)

**HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG**

**Peserta Ujian**

**Nama : Fernando Morientes**

**NIM : 1640050168**

**EFEKTIFITAS PERATURAN BERSAMA MENTERI NOMOR 8 DAN 9  
TAHUN 2006 TERHADAP REGULASI PERIZINAN RUMAH IBADAT  
KHUSUSNYA BAGI PENGANUT AGAMA MINORITAS DI INDONESIA**

**Disetujui**

**Pembimbing I**



**(Poltak Siringoringo S.H., M.H.)**

**Pembimbing II**



**(DR. Manotar Tampubolon S.H., M.H.)**

**Mengetahui,**

**Kepala Departemen Hukum Tata Negara**



**(Tomson Situmeang S.H., M.H.)**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan kasih dan karunia-Nya didalam setiap kehidupan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“EFEKTIFITAS PERATURAN BERSAMA MENTERI NOMOR 8 DAN 9 TAHUN 2006 TERHADAP REGULASI PERIZINAN RUMAH IBADAT KHUSUSNYA BAGI PENGANUT AGAMA MINORITAS DI INDONESIA”**.

Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas dan syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat. Penulis tentunya dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak, sehingga dalam kesempatan ini dengan segenap kerendahan hati dan tanpa mengurangi rasa hormat penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan bantuan secara moril dan materil secara langsung maupun tidak langsung terhadap penulisan skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Hulman Panjaitan S.H, M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia;
2. Ibu L. Elly Pandiangan S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Inonesia;
3. Bapak Poltak Siringoringo S.H., M.H. selaku Kepala Prodi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dan dosen pembimbing I penulis;
4. Bapak Tomson Situmeang S.H., M.H. selaku Kepala Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia;
5. Bapak Jimmy Simanjuntak S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
6. Bapak DR. Manotar Tampubolon S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya dalam memberikan bantuan, bimbingan dan arahan-arahan kepada penulis pada saat penulisan skripsi ini;

7. Teristimewa kepada mama tercinta yang telah memberikan dukungan doa, moral dan kasih, serta dapat mencukupi semua kebutuhan penulis, mendidik dan membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia;
8. Terkasih kepada Tulang alm. Manutur Sigalingging yang telah membantu memberikan bantuan penuh kepada penulis baik secara formil maupun materil selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia; i love you my Superhero and i miss you so much
9. Bou Ratna yang penulis cintai, yang membantu penulis secara materil dan formil selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia;
10. Teruntuk adik penulis, Sarah dan Jeremy, yang saya cintai, yang selalu memberi saya dukungan, dalam segala bentuk
11. Teruntuk teman – teman GNGA khususnya sahabat penulis sejak TK yakni Reinhard Yeremia, Edho Ricardo, Febrianus yang selalu membantu penulis dalam segala hal dan memberi dukungan dalam kondisi apapun serta tak lupa kepada Endru dan terlebih Yosua Mario semoga lulus di semester depan
12. Basis flonimin, teman serta sahabat penulis yaitu Josua Binoto, Timothy Caesar, Sahat Francisko, Mario Parasian, Eliady Hulu, serta Matius Belmojay, yang selalu menjadi teman terbaik penulis,

Jakarta, Januari 2020

Penulis

Fernando Morientes

## DAFTAR ISI

BAB I : EFEKTIFITAS PERATURAN BERSAMA MENTERI NOMOR 8 DAN 9 TAHUN 2006 TERHADAP REGULASI PERIZINAN RUMAH IBADAT KHUSUSNYA BAGI PENGANUT AGAMA MINORITAS DI INDONESIA .....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	9
C. RUANG LINGKUP PENELITIAN .....	9
D. MANFAAT PENELITIAN .....	10
E. KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEP.....	11
F. METODOLOGI PENELITIAN .....	22
G. SISTEMATIKA PENULISAN .....	25
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....	28
1. TEORI NEGARA HUKUM .....	28
2. TEORI HAK ASASI MANUSIA .....	45
3. TEORI KEADILAN.....	61
a. Teori Keadilan Plato.....	62
b. Teori Keadilan Aritoteles .....	64
c. Teori Keadilan John Rawls.....	65
d. Teori Keadilan Hans Kelsen.....	69
B. KERANGKA KONSEP .....	71
BAB III .....	85
A. SURAT KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI DAN KEDUDUKAN HUKUMNYA .....	85
B. SEJARAH SURAT KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI DALAM PENYELESAIAN KONFLIK BERAGAMA DI INDONESIA.....	89
C. JENIS DAN MATERI MUATAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA .....	95
D. KEDUDUKAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL .....	99
E. IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI NOMOR 8 DAN 9 TAHUN 2006 DALAM PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH.....	105
F. ANALISIS EFEKTIFITAS PBM .....	119
BAB IV .....	128



A. PERATURAN BERSAMA MENTERI NOMOR 8 DAN 9 YANG DISKRIMINATIF BAGI MINORITAS .....	128
B. PEMERINTAH PUSAT DALAM KONFLIK RUMAH IBADAH .....	131
Lembaga-Lembaga Agama di Indonesia.....	131
1. Kementerian Agama.....	131
2. Majelis Ulama Indonesia.....	134
3. Forum Kerukunan Umat Beragama .....	138
C. DISKRIMINASI TEMPAT IBADAH BAGI KAUM MINORITAS .....	141
1. GKI Yasmin, Bogor .....	143
2. HKBP Filadelfia, Bekasi .....	145
3. Dari Jawa hingga Timor, Penutupan Paksa Rumah Ibadah .....	147
D. PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGANI KONFLIK RUMAH IBADAH .....	153
1. Polisi Bersekongkol dengan Militan Islamis.....	161
2. Polisi Gagal Mencegah Kekerasan Meski Ada Peringatan .....	163
3. Menyalahkan Minoritas Agama .....	165
E. ANALISA PENULIS TENTANG EFEKTIFITAS PERATURAN BERSAMA MENTERI NOMOR 8 DAN 9 TAHUN 2006.....	170
BAB V.....	173
KESIMPULAN DAN SARAN .....	173
A. KESIMPULAN .....	173
B. SARAN.....	174
DAFTAR PUSTAKA.....	175

### ABSTRAK

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| A. Nama Mahasiswa        | : Fernando Morientes   |
| B. Nomor Induk Mahasiswa | : 16.400.501.68  |
| C. Judul Skripsi         | : Efektifitas Peraturan Bersama<br>Menteri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006<br>Terhadap Regulasi Perizinan Rumah<br>Ibadat Khususnya Bagi Penganut Agama<br>Minoritas Di Indonesia |
| D. Program Kekhususan    | : Hukum Tata Negara  |
| E. Daftar Acuan          | : Buku, Jurnal, Peraturan<br>Perundang-undangan  |
| F. Kata Kunci            | : Peraturan Bersama Menteri, Minoritas,<br>Diskriminatif   |
| G. Ringkasan Isi         | :  |

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai macam budaya dan agama. Namun, keberagaman kehidupan beragama di Indonesia sering terjadi konflik horizontal. Hal ini disebabkan oleh tidak tegasnya Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah dalam menangani konflik beragama. Selain itu adanya regulasi rumah ibadat yang terkesan diskriminatif khususnya bagi kaum minoritas.

Sejak pemberlakuan Peraturan Bersama Menteri nomor 8 dan 9 tahun 2006 yang mengatur regulasi rumah ibadat secara khusus seringkali minoritas kesulitan dalam proses perizinan dan pembangunan rumah ibadat. Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dengan melihat berbagai contoh kasus di lapangan yang pada umumnya merugikan kaum minoritas

Peraturan Bersama Menteri memiliki kekuatan yang kurang mengikat secara hukum dibanding dengan Undang - Undang. Sudah banyak pihak yang menganggap peraturan ini diskriminatif terlebih bagi kaum minoritas namun belum ada tanda – tanda Pemerintah akan bertindak terkait Peraturan Bersama Menteri ini akan dicabut ataupun revisi bahkan dibuatkan dalam Undang-Undang.

Pembimbing :

Pembimbing I : Poltak Siringoringo S.H., M.H.

Pembimbing II: DR.Manotar Tampubolon S.H., M.H.

## ABSTRACT

- A. *Name* : Fernando Morientes  
 B. *Student ID* : 16.400.501.68  
 C. *Title* : Efektifitas Peraturan Bersama  
 Menteri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006  
 Terhadap Regulasi  
 Perizinan Rumah Ibadat Khususnya  
 Bagi Penganut Agama Minoritas  
 Di Indonesia  
 D. *Study Program* : Hukum Tata Negara  
 E. *Reference List* : Buku, Jurnal, Peraturan Perundang –  
 Undangan  
 F. *Keywords* : Peraturan Bersama Menteri,  
 Minoritas, Diskriminatif  
 G. *Summary* :

Indonesia is a country that consists of various cultures and religions. However, the diversity of religious life in Indonesia often results in horizontal conflicts. This is caused by the indecisiveness of the central government and regional governments in dealing with religious conflicts. In addition, the existence of regulations on houses of worship that seems discriminatory, especially, for, minorities.

Since the enactment of the Joint Ministerial Regulations number 8 and 9 of 2006 which specifically regulate the synagogue regulations, often the minority has difficulties in the process of licensing and construction of houses of worship. This research was conducted through a literature study by looking at various examples of cases in the field which generally, disadvantage, minorities

Joint Ministerial Regulations have less legally binding force than the Law. There have been many parties who consider this regulation discriminatory especially for minorities but there are no signs that the Government will act in conjunction with this Ministerial Joint Regulation which will be revoked or even revised in the Law.

*Academic Supervisor* : 1. Poltak Siringoringo S.H., M.H.

*Academic Supervisor* : 2. DR. Manotar Tampubolon S.H., M.H.